

PENGARUH AKUNTABILITAS, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Pada OPD Kabupaten Lamongan)

Cindy Oktaviyanti¹, Ana Fitriyatul Bilgies², Have Zulkarnaen³
Cindyoktaviyanti16@gmail.com¹, anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id²,
havezulkarnaen@unisda.ac.id³

Program Sudi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of accountability, clarity of budget targets, and budgetary participation on managerial performance in local government agencies in Lamongan Regency. The population in this study were all OPD offices of Lamongan Regency, totaling 21 departments. The sampling technique in this study used purposive sampling method. Data collection techniques in this research by distributing questionnaires to respondents. The questionnaires distributed were 105 questionnaires with a return rate of 89 questionnaires or 84% of the total questionnaires sent. The data were analyzed using the multiple linear regression method and processed with the SPSS Version 22 program. Based on the results of the study, it was concluded that Accountability had a positive effect on Managerial Performance in Lamongan Regency agencies, Clarity of Budget Targets had a positive effect on Managerial Performance in Lamongan Regency agencies, Budgetary Participation had an effect on Positive on Managerial Performance in Lamongan Regency Institutions. Accountability, Clarity of Budget Targets and Budgetary Participation simultaneously affect Managerial Performance in Lamongan Regency agencies.

Keywords : Accountability, Clarity of Budget Goals, Budgetary Participation, and Managerial Performance.

Pendahuluan

Sejak era pemerintahan Orde lama hingga bergulirnya era Reformasi, telah mengalami perubahan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang memberikan dampak kepada Indonesia. Perubahan Reformasi tersebut muncul karena adanya desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah di setiap wilayah Indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi di setiap wilayah sangatlah membantu untuk memfokuskan kesejahteraan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing melalui Instansi Pemerintahan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) tentang pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan, untuk meningkatkan dan pemerataan pembangunan; supaya terjadi peningkatan dan pemerataan, khususnya dalam hal pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan organisasi yang bergerak dalam organisasi sektor publik yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah, sehingga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh Instansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah sendiri memiliki berbagai macam bidang diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan. Namun tujuan utama dalam terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

(Rokhman, 2017) Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat untuk memenuhi ekspektasi terkait dengan fungsinya. Manajerial kinerja adalah ukuran seberapa efektif dan efisien manajer yang telah bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kinerja manajerial dibutuhkan untuk mengetahui seberapa visi, misi serta tujuan suatu organisasi yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Semakin berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat lebih kritis akan kinerja Instansi Pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan. Sehingga dengan adanya kinerja manajerial diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan Instansi Pemerintahan terutama dalam bidang pelayanan masyarakat, tidak meragukan akan kinerja yang dilakukan instansi pemerintah apabila instansi pemerintah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

(Darmawan, 2016) Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip atau laporan pertanggungjawaban dari DPRD kepada masyarakat yang menyatakan bahwa proses pertanggungjawaban dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya. Maka dengan adanya akuntabilitas publik masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

(Fathia, 2017) Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kejelasan anggaran maka akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui seberapa progres pemerintah dalam menangani anggaran yang telah direncanakan. Dan dengan Kejelasan sasaran anggaran maka akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi sebuah organisasi. Partisipasi adalah suatu proses

pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak di masa akan datang bagi pembuat keputusan (Erina and Suartana, 2016). Partisipatif Penganggaran merupakan tanggung jawab manajer tingkat atas untuk memberikan dorongan kepada manajer tingkat bawah agar lebih meningkatkan kinerjanya. Partisipasi anggaran juga memiliki peran penting terhadap Organisasi Pemerintahan Daerah, dalam pemerintahan satuan kerja harus ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang telah direncanakan untuk oleh anggota sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap satuan. Penelitian mengenai partisipasi anggaran dalam sektor publik terutama kaitannya dengan kinerja manajerial sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi penyusunan anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. (Zein, 2016)

(Wianti and Sisdyanti, 2016) Mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial SKPD di Kota Denpasar. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yuni Ningsih, 2019) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Surabaya.

(Darmawan, 2016) Mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bengkalis. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rosalinda & Widajantie, 2021) bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

(Friyanty, 2016) Mengemukakan bahwa Partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah Indramayu. Partisipasi anggaran memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta kerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sudirman dkk, 2018) bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap anggaran.

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah 1). Bagaimana akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 2). Bagaimana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 3). Bagaimana partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, 4) Bagaimana akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial. 2). Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. 3). Mengetahui pengaruh partisipasi penganggaran

terhadap kinerja manajerial. 4). Mengetahui pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.

Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Sehingga dalam suatu Organisasi publik untuk melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat melalui kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik atau pemerintah. Oleh karena itu, suatu organisasi publik dibutuhkan kerjasama yang baik agar mendapat hasil yang maksimal dan mencapai kinerja organisasi yang telah dirancang (Bahri, 2017).

Hubungan Teori *Stewardship* dengan penelitian adalah teori ini mengacu pada sebuah perilaku *Steward*, sebab *Steward* mengacu terhadap perilaku sehingga dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Implikasi teori terhadap penelitian ini yaitu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai keinginan yang telah diharapkan, dapat mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan kepada masyarakat kepada wakil rakyat.

Teori Good Governance

Good Governance sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), yang menekankan pada proses demokratisasi dari bawah, fokusnya adalah dalam konteks politik dari negara dan pemahaman struktur kekuasaan dan bagaimana perubahan struktur kekuasaan secara demokratis. Demokrasi bukan hanya cara untuk memecahkan masalah-masalah politik praktis tetapi juga cara untuk transformasi identitas seperti dunia simbolis dari inklusif dan solidaritas kebangsaan. Proses pengambilan keputusan, serta gerakan populer yang tumbuh dari masyarakat sipil (Handayani & Nur, 2019).

Hubungan antara teori *Good Governance* dengan penelitian ini adalah terkait dengan pentingnya tata kelola pemerintahan yang menggunakan prinsip yang bersih tanpa korupsi dan memberikan keterbukaan kepada masyarakat, serta komitmen yang mengikutsertakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan jawaban, yang dalar dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan (Arifani *et al.*, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan terstruktur dari pertanggungjawaban seluruh keberhasilan ataupun kegagalan dalam kegiatan yang dipercayai oleh pemangku keputusan kebikan rakyat dalam rangka mewujudkan misi organisasi sesuai dengan masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga mengetahui apa saja pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintahan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Pelaksana anggaran merupakan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran menurut (Darmawan, 2016). Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut menurut (Erina & Suartana, 2016). Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab melaksanakannya. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai.

Partisipasi Penganggaran

Partisipasi anggaran merupakan tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan metode yang paling baik dalam penyusunan anggaran, karena semua komponen yang ada dalam organisasi ikut terlibat dalam penyusunan anggaran (Andriyani & Putri, 2019).

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran juga memberikan informasi kepada para pimpinan satuan kerja pusat pertanggungjawaban untuk menetapkan isi anggaran yang akan disusun. Wewenang yang dimiliki ini memberikan peluang bagi partisipan untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mempermudah pencapaian anggaran sehingga dapat merugikan organisasi tersebut.

Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Rokhman, 2017). Kinerja diartikan sebagai tingkat untuk memenuhi ekspektasi terkait dengan fungsinya. Manajerial kinerja adalah ukuran seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Kinerja manajerial adalah proses pencapaian hasil yang dilakukan oleh manajer secara efektif dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Variabel kinerja manajerial diukur melalui instrumen *self rating* yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) dan alfar (2006), dimana setiap responden diminta untuk mengukur kinerja dengan sendiri melalui delapan dimensi yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staff, negosiasi, dan perwakilan serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala sub bagian, dan kepala bidang secara menyeluruh (Yuni Ningsih, 2019).

Kinerja manajerial yang diperoleh manajer merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Nengsy, 2017). Kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi fungsi perencanaan, investasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan atau representasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja manajerial merupakan seberapa jauh kemampuan manajer dalam menjalankan fungsi fungsinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan mengacu pada Teori Akuntansi yang positif. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamongan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan obyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Wianti & Sisdyanti, 2016). Penelitian ini mengambil populasi pada Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 25 instansi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Erina & Suartana, 2016). Sampel dari penelitian ini diambil dari 21 Dinas-Dinas di Kabupaten Lamongan. Masing masing Dinas akan mewakili 5 orang aparat mulai dari Kepala dinas, eselon II, III, IV dan kasubag Dinas.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yang berarti dengan adanya pertimbangan dan kriteria tertentu dalam proses pengambilan sampel (Yuni Ningsih, 2019). Dengan kriteria yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah: 1). Responden yang telah menjabat minimal satu tahun di OPD Kabupaten Lamongan. 2) Memiliki kedudukan satu/dua level manajemen dibawah kepala OPD. 3). Telah menempuh pendidikan minimal S1.

Untuk membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden, data ini bersumber dari wawancara, kuesioner, observasi atau diskusi. Seperti jawaban responden yang menggambarkan terhadap akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial.
- b. Data sekunder yaitu segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan.

Penguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual dan secara simultan,

Hasil Dan Pembahasan

Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial dinilai menggunakan 8 item pernyataan. Total Skor jawaban responden 296.743, nilai minimal 24.00 nilai maksimal 39.00.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dinilai menggunakan 5 item pernyataan. Total Skor jawaban responden 203.431, nilai minimal 15.00 nilai maksimal 24.00.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan Sasaran Anggaran dinilai menggunakan 4 item pernyataan. Total Skor jawaban responden 182.656, nilai minimal 10.00 nilai maksimal 20.00.

Partisipasi Penganggaran

Partisipasi Penganggaran dinilai menggunakan 4 item pernyataan. Total Skor jawaban responden 184.914, nilai minimal 12.00 nilai maksimal 19.00.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari 89 responden, terdapat 21 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka semua item pernyataan pada variabel-variabel dinyatakan valid. Nilai r_{tabel} diperoleh dengan persamaan $N-2 = 89-2 = 0,2084$. Nilai r_{hitung} untuk pernyataan semua variabel adalah lebih besar dari r_{tabel} . Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing pernyataan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

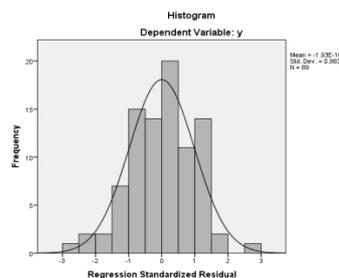
Pengukuran uji reliabilitas dapat diketahui dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan nilai koefisien reliabilitas yang nilainya $> 0,6$ menunjukkan bahwa instrument penelitian reliabel. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut ujnormalitas pada gambar 1.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil output SPSS versi 22.

Berdasarkan tampilan grafik histogram pada gambar 5 diatas dapat dilihat bahwa hasil grafik histogram menunjukkan pola yang tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

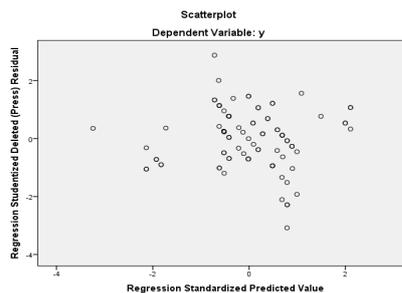
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran, memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat

multikolinieritas antar variabel dan dapat dikatakan model regresi reliabel atau layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil output SPSS versi 22

Berdasarkan gambar 5, dapat menunjukkan bahwa data (titik-titik) menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran, terhadap kinerja manajerial. Hasil uji analisis regresi linier berganda ada pada tabel 4.15.

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Constant	5.864	1.613		3.635	.000
	X1	.265	.100	.181	2.639	.010
	X2	1.061	.112	.653	9.441	.000
	X3	.257	.102	.160	2.535	.013

Sumber: Hasil output SPSS versi 22

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.15, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 5.864 + 0.265X_1 + 1.061X_2 + 0.257X_3 + e$$

- a) Nilai konstanta (α) sebesar 5.864 mempunyai arti jika variabel akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran dinyatakan konstan pada angka 0, maka nilai kinerja manajerial sebesar 5.864.
- b) Koefisien regresi b_1 sebesar 0,265 mempunyai arti bahwa jika variabel akuntabilitas meningkat, maka variabel kinerja instansi pemerintah daerah memiliki kecenderungan akan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- c) Koefisien regresi b_2 sebesar 1,061 mempunyai arti bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran meningkat, maka variabel kinerja instansi pemerintah daerah memiliki kecenderungan akan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- d) Koefisien regresi b_3 sebesar 0,257 mempunyai arti bahwa jika variabel partisipasi penganggaran meningkat, maka variabel kinerja instansi pemerintah daerah memiliki kecenderungan akan meningkat, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis untuk regresi penelitian menggunakan rumus $n-k-1$ dimana n = jumlah sampel sedangkan untuk k = banyaknya variabel independen, sehingga dapat diketahui bahwa $df = 89-3-1$, maka $df = 85$, dengan nilai $\alpha = 5\% (0,05)$. Jika $df = 85$ maka nilai $t_{tabel} = 1,662$ (lampiran tabel t).

- 1) Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18 dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.639. Nilai signifikansi $0,010 < 0,05 (5\%)$, sedangkan nilai t_{hitung} pada variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,639 > 1,662$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dan variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dimana penelitian ini diambil pada OPD Kabupaten Lamongan.
- 2) Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18 dapat menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,441. Nilai signifikansi $0,00 < 0,05 (5\%)$, sedangkan nilai t_{hitung} pada variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $9,441 > 1,662$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dimana penelitian ini diambil pada OPD Kabupaten Lamongan.
- 3) Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.18 dapat menunjukkan partisipasi penganggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,535. Nilai signifikansi $0,013 < 0,05 (5\%)$, sedangkan nilai t_{hitung} pada variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,535 > 1,662$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dan variabel partisipasi penganggaran berpengaruh

positif terhadap kinerja manajerial dimana penelitian ini diambil pada OPD Kabupaten Lamongan.

Uji Ketetapan Model (F)

Uji F digunakan untuk menguji semua variabel independen Uji F yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus $df_1 = k - 1$, dimana k adalah banyaknya variabel (bebas+terikat), sehingga $df_1 = 4 - 1 = 3$, dan $df_2 = n - k$, dimana n =jumlah sampel, sehingga dapat diketahui bahwa $df_2 = 89 - 4 = 85$ dengan nilai signifikansi 5% (0.05), $df_1 = 3$, $df_2 = 85$, jadi dapat dilihat pada $f_{tabel} = 2,712$.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tingkat signifikansi nilai F sebesar 0,000 atau $< 0,05$ (5%) dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar $101.155 > 2,712$. Hal ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dan variabel independen (akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran) secara bersama-sama berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (kinerja manajerial).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai R^2 yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,781 atau 78,1% yang dapat diartikan bahwa kinerja manajerial pada OPD Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi. Sisanya sebesar 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2.639 > 1,662$, sedangkan hasil nilai signifikansi variabel akuntabilitas yaitu sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan. Berdasarkan Hipotesis 1 (H_1) dalam penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wianti dan Sisdyanti (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial. Kewo (2017) menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selain itu ada juga penelitian dari Darmawan (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $9.441 > 1,662$, sedangkan hasil nilai signifikansi variabel akuntabilitas yaitu sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ menyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan. Berdasarkan Hipotesis (H2) dalam penelitian yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan (2016) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, Muzahid (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berdampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Selain itu ada juga penelitian dari Nina Sumari (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t_{hitung} variabel akuntabilitas lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2.535 > 1,662$, sedangkan hasil nilai signifikansi variabel akuntabilitas yaitu sebesar $0,013$ lebih kecil dari $0,05$ menyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan. Berdasarkan Hipotesis (H3) dalam penelitian yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frianty (2016) menunjukkan bahwa Partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Laras Dwi (2020) menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai F sebesar $0,000$ atau $< 0,05$ (5%) dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu sebesar $101.155 > 2,712$. menyatakan bahwa variabel independen (akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kinerja manajerial). Berdasarkan Hipotesis (H3) dalam penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penganggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran secara parsial maupun simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Wianti dan Sisdyanti (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas,

kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penganggaran memiliki hubungan positif secara simultan terhadap kinerja manajerial. Dan penelitian dari Nina Sumarni (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penganggaran memiliki hubungan positif secara simultan terhadap kinerja manajerial.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan.
3. Hasil penelitian ini membuktikan Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penganggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Lamongan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah.

1. Bagi Intansi atau Dinas di Kabupaten Lamongan untuk dapat mempertahankan kinerjanya. Dan Dinas-dinas di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal akuntabilitas.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan metode dalam pengambilan data, bukan hanya metode survei dengan menggunakan kuesioner tetapi juga melakukan wawancara secara langsung dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja seperti pengaruh gender, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Desentralisasi, sistem pengendalian internal dan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani Tri dan Putri (2019), Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 2 No.2 Edisi Agustus 2019: 1316-1342. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I02.P18>

- Arifani, Cindy dkk (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Da Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, Vol 13 No.01 Edisi Mei 2018: 68-82.
- Bahri, Nur Alim (2017). Studi Kritis: Realisasi Anggaran Sektor Publik Ditinjau dari *StewardshipTheori* dalam Aplikatif Kartu Indonesia Sehat, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Darmawan, R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di SKPD Kabupaten Bengkalis, *JOM Fekon*, Vol 3 No. 1 Edisi Februari 2016:792-806.
- Erina, dan Wayan Suartana (2016), Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan Anggaran, Kapasitas Individu, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol XV No.02 Edisi Mei 2016: 973-1000.
- Fathia, Nurul (2017), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Study Kasus Skpd Di Provinsi Riau), *JOM Fekon*, Vol IV No.01 Edisi Februari 2017: 670-685.
- Friyanty, Ita (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Aparat Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Indramayu), *Jurnal Tekun*. Vol VII No.01 Edisi Maret 2016: 62-79.
- Handayani dan Mohamad Ichsana Nur (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* Vol 11No.1 Edisi Juni 2019: 1–11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Muzahid, M. (2019). The Effect Of Participatory Budgeting, Clarity Of Budget Objectives On Managerial Performance In North Aceh District. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 17–32. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.9.1.17-32>
- Nengsy, Hendra (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pt. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 16 No. 2 Edisi Juli-Desember 2017: 1-16.

- Rokhman, (2017). Improving Managerial Performance Through Participation Role Of Budget Preparation: A Theoretical And Empirical Overview. *Iosr Journal Of Economics And Finance*, 08(01), 39–43. <https://doi.org/10.9790/5933-0801013943>
- Rosalinda, & Widajantie,. *The Influence Of Budget Accuracy, Clarity Of Budget Targets, And Managerial Control On Performance Accountability*. 12.
- Sudirman, Saraswati,& Usman, . (2018). The Effect Of Budget Participation On Budgetary Slack. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 79(7), 150–157. <https://doi.org/10.18551/Rjoas.2018-07.16>
- Suharyono,(2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal Of Public Finance*, 236–249. <https://doi.org/10.30927/Ijpf.584834>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wianti, dan Eka Ardhani Sisdyanti (2016), Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penganggaran Pada Kinerja Manajerial Di SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 17 No.2 Edisi November 2016:1428-1454.
- Yuni Ningsih, Fitra. (2019). Pengaruh Penganggaran Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya, *Skripsi*, Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.